

Berpotensi ganggu Pilpres,

Polri gerak cepat tangani kasus Sarumpaet

Sabtu, 6 Oktober 2018 12:22 WIB



Ratna Sarumpaet (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Dirkrimum Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat (5/10/2018). Ratna Sarumpaet, tersangka penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan dirinya, menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan.

ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Semarang (ANTARA News) - Kepolisian Negara Republik Indonesia bergerak cepat menangani kasus hoaks penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet karena berpotensi mengganggu Pemilu Presiden 2019, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

Apalagi, kata Teguh Yuwono di Semarang, Sabtu pagi, posisi Ratna Sarumpaet (ketika itu) sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Prabowo Subianto/Sandiaga Uno.

Menurut alumnus Flinders University Australia itu, kejadian serupa berpotensi akan berulang bila tidak ada kontrol para pihak, baik Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan.

Teguh yang juga Ketua I Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) Jawa Tengah menyatakan bahwa semua pihak patut mengapresiasi kerja Polri yang cepat menyajikan bukti-bukti hingga Ratna Sarumpaet mengakui bahwa tidak ada penganiayaan terhadap dirinya.

Setelah ada pelaporan, Selasa (2/10), Polri langsung bertindak dengan melakukan penyelidikan. Di tengah ramainya twit mengenai kasus penganiayaan tersebut, ada sejumlah akun yang kirim pesan melalui layanan jejaring sosial Twitter maupun WhatsApp berisi "Laporan Hasil Penyelidikan Viralnya Berita Pengeroyokan Ratna Sarumpaet".

Baca juga: [Ratna Sarumpaet bakal dijerat dengan pasal berlapis](#)

Dalam laporan, baik berupa foto maupun portable document format (PDF), terungkap bahwa pada hari-H penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, 21 September 2018, tidak ada konferensi negara asing di Jawa Barat sebagaimana info dari RS. Bahkan, dalam laporan berbentuk PDF sebanyak 11 halaman itu, menyebutkan bahwa Polda Jabar menurunkan anggotanya untuk mengecek 23 rumah sakit di provinsi itu. Namun, tidak ada pasien atas nama Ratna Sarumpaet.

Begitu pula, hasil koordinasi dengan pihak terkait, seperti Bandara Internasional Husein Sastranegara, taksi, aviation security (avsec), sopir rental, porter, dan tukang parkir, tidak mengetahui peristiwa pengeroyokan terhadap Ratna Sarumpaet.

Laporan itu juga memuat hasil penyelidikan Polda Metro Jaya yang mengungkapkan fakta "call data record" nomor ponsel 62811950XXX sejak 20 s.d. 24 September 2018, nomor tersebut aktif di daerah Jakarta.

**Baca juga: [Ratna Sarumpaet ditangkap saat hendak ke Chili](#)
[Ratna membayar rumah sakit pakai rekening dana amal Danau Toba](#)**

Halaman berikutnya dari "Laporan Hasil Penyelidikan Viralnya Berita Pengeroyokan Ratna Sarumpaet", seorang petugas menunjukkan Ruang Rawat Inap Ratna Sarumpaet (Ruang B.1 Lantai 3 RS Khusus Bedah Bina Estetika Jakarta Pusat).

Tidak hanya itu, menyajikan pula foto Ratna Sarumpaet bersama asisten keluar dari kamar rawat inap, lift, hingga yang bersangkutan keluar RS dengan menggunakan taksi.

"Fakta-fakta ini menunjukkan kinerja polisi yang profesional sekaligus membuat Ratna Sarumpaet tidak bisa mengelak sehingga dia minta maaf kepada publik," kata Teguh Yuwono.

Seperti diwartakan, ketika akan ke Chile, Ratna Sarumpaet diamankan di Bandara

Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Kamis (4/10).

Polda Metro Jaya lalu menetapkan perempuan berusia 69 tahun itu sebagai tersangka, kemudian menahan yang bersangkutan selama 20 hari ke depan, mulai Jumat (5/10) malam.

Baca juga: PKB apresiasi langkah Polri tangani kasus Ratna Sarumpaet

Komite Solidaritas mengajukan pencabutan penghargaan pejuang HAM bagi Ratna Sarumpaet

Pewarta: Kliwon

Editor: Junaydi Suswanto